

## Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Timur Periode 2018-2022

Saukina Ila Salsabila<sup>1</sup>, Suhaeda Nabila<sup>2</sup>, Risma Ayu Rianti<sup>3</sup>, Dhimas Priyoga<sup>4</sup>, Agus Eko Sujianto<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Kabupaten Tulungagung

Korespondensi penulis : [salsabilasaukina@gmail.com](mailto:salsabilasaukina@gmail.com)<sup>1</sup>, [suhaedanabila73@gmail.com](mailto:suhaedanabila73@gmail.com)<sup>2</sup>, [risma270621@gmail.com](mailto:risma270621@gmail.com)<sup>3</sup>, [adhimaspri@gmail.com](mailto:adhimaspri@gmail.com)<sup>4</sup>, [agusekosujianto@gmail.com](mailto:agusekosujianto@gmail.com)<sup>5</sup>

**ABSTRACT.** This research aims to determine the effect of minimum wages and labor force participation on open unemployment in East Java Province 2018-2022. The dense population makes Indonesia face economic problems such as open unemployment. This happens because the number of job seekers is not balanced with the number of jobs available. The level of open unemployment occurs in every region, especially in East Java Province. Based on BPS data for the 2018-2022 period, East Java Province experienced an increase in open unemployment in 2020 with a percentage of 5.84%. The research method used uses a quantitative descriptive model approach with combined data between time series and cross-sections. The analytical method used in this research is the multiple regression test method, panel data model which is processed using SPSS version 26. The data collection technique is taken from secondary data from BPS East Java Province in 38 regions. The research results show that the influence of minimum wage instruments and labor force participation on open unemployment in East Java Province can be seen from the statistical probability values of the t test and f test. The results of the t test showed that the minimum wage instrument (X1) had a significant effect on the open unemployment rate (Y) in East Java Province. Meanwhile, the labor force participation instrument (X2) does not show a significant influence on the open unemployment rate (Y) in East Java Province. Meanwhile, the results of the f test research show that the two instruments (X1 and X2) simultaneously have a significant influence on the open unemployment rate (Y) in East Java Province.

**Keywords:** Minimum Wage, Labor Force, Unemployment

**ABSTRAK.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum dan partisipasi angkatan kerja terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur 2018-2022. Jumlah penduduk yang padat membuat Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi seperti pengangguran terbuka. Hal ini terjadi karena jumlah pencari kerja tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Tingkat pengangguran terbuka terjadi di setiap daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data BPS periode 2018-2022, Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan pengangguran terbuka pada tahun 2020 dengan persentase 5,84%. Metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan model deskriptif kuantitatif dengan data gabungan antara time series dengan cross-section. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode uji regresi berganda model data panel yang diolah menggunakan SPSS versi 26. Teknik pengumpulan data yang diambil dari data sekunder berasal dari BPS Provinsi Jawa Timur sejumlah 38 wilayah. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang diberikan oleh instrumen upah minimum dan partisipasi angkatan kerja terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari nilai probabilitas statistik uji t dan uji f. Hasil uji t diperoleh instrumen upah minimum (X1) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y) di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan instrumen partisipasi angkatan kerja (X2) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y) di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan hasil penelitian uji f menunjukkan bahwa kedua instrumen (X1 dan X2) secara bersamaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y) di Provinsi Jawa Timur.

**Kata Kunci:** Upah Minimum, Angkatan Kerja, Pengangguran

## **PENDAHULUAN**

Pengangguran telah menjadi permasalahan dalam perekonomian yang sulit terpecahkan disetiap negara. Negara Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang masih dikategorikan berkembang, yang dimana suatu permasalahan yang sering sekali terjadi di negara berkembang salah satunya yaitu tingkat pengangguran terbuka yang tinggi. Tentunya hal tersebut dapat menghambat pembangunan ekonomi yang diharapkan, sekaligus berpengaruh juga pada standar kehidupan dan perilaku masyarakat.

Jumlah penduduk di Indonesia telah masuk dalam kategori negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia, yang telah mencapai peringkat keempat. Dengan memiliki jumlah penduduk yang melimpah ini, seharusnya bisa menjadi modal yang besar untuk dapat memajukan pembangunan perekonomian nasional. Akan tetapi jumlah penduduk yang besar ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat permasalahan indikator pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satunya yaitu permasalahan pada lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi akibat lapangan yang terbatas tidak seimbang dengan jumlah para pencari kerja yang tersedia serta kurang optimalnya penyerapan tenaga kerja, sehingga mengakibatkan timbulnya kemiskinan, ketimpangan sosial maupun ekonomi, serta masalah-masalah lainnya.

Permasalahan ini nampaknya juga terjadi di Provinsi Jawa Timur dengan penduduk penghasil angkatan kerja yang lumayan banyak dari tahun ke tahun, artinya hal ini dapat menjadi salah satu instrumen untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi. Karena peningkatan ketersediaan tenaga kerja yang banyak tentu akan menimbulkan pada peningkatan produktifitas, yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan PDB dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Tetapi hal ini dapat terjadi apabila dibersamai oleh kontribusi angkatan kerja yang memiliki klasifikasi yang baik dan sesuai, sehingga akan menimbulkan produktivitas yang baik pula. Namun jika yang terjadi sebaliknya seperti kontribusi dari angkatan kerja tersebut tidak memiliki klasifikasi yang baik dan sesuai, yang pada akhirnya tidak dapat terserap oleh pasar, maka hal tersebut yang berakibat timbulnya pengangguran terbuka terjadi.

Fenomena pengangguran terbuka dapat diakibatkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti upah minimum dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Berdasarkan hasil konferensi ILO di Geneva, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan ketersediaan pekerjaan memiliki dampak buruk yang terbagi menjadi tiga perspektif yaitu: Pertama, dari perspektif pekerja yaitu merasa bahwa upah yang diterima di bawah standar dan hal itu dapat membawa dampak terhadap menurunnya kepuasan kerja, dalam pencarian kerja, bahkan meningkatnya resiko tidak bekerja. Kedua, dari perspektif perusahaan yang dampaknya

dapat menurunkan produktivitas dan pertumbuhan perusahaan. Ketiga, dari perspektif masyarakat yaitu karena ketidaksesuaian ini dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tidak optimal, dan berakibat tingkat pengangguran meningkat (ILO, 2017).

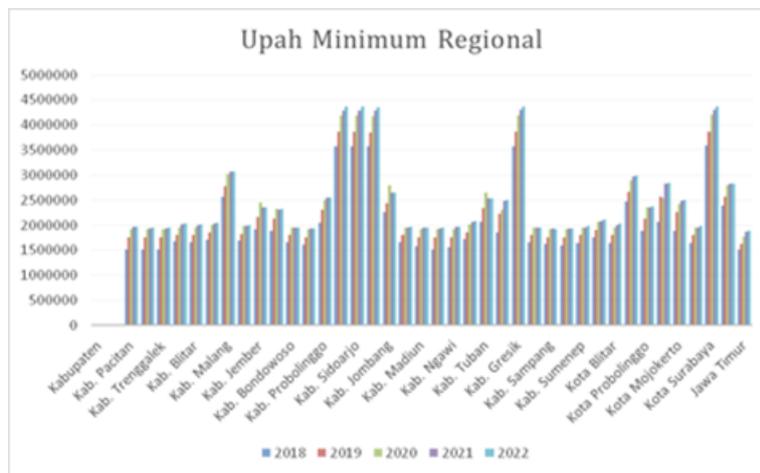
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa yang dinamakan pengangguran ialah seseorang yang masih sedang aktif mencari pekerjaan, sedang bersiap-siap memulai usaha, tidak mencari pekerjaan karena keterbatasan kemampuan, atau yang sudah memiliki pekerjaan namun belum memulai bekerja. Selain itu, standar upah minimum dapat menurunkan tingkat angkatan kerja yang diserap oleh bidang-bidang pekerjaan sehingga dapat berpotensi meningkatkan pengangguran (Mankiw, 2006). Beberapa ahli ekonom berpendapat, bahwa peningkatan upah minimum yang melebihi tingkat pasar dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Peningkatan ini yang menyebabkan sejumlah pengusaha mengurangi tenaga kerja, sehingga terjadi peningkatan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran sendiri merupakan salah satu faktor kompleks yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, khususnya pada negara berkembang, dimana hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa model atau variabel seperti upah minimum regional yang berbeda serta tingkat partisipasi usia angkatan kerja yang dianggap sudah mampu untuk bekerja.



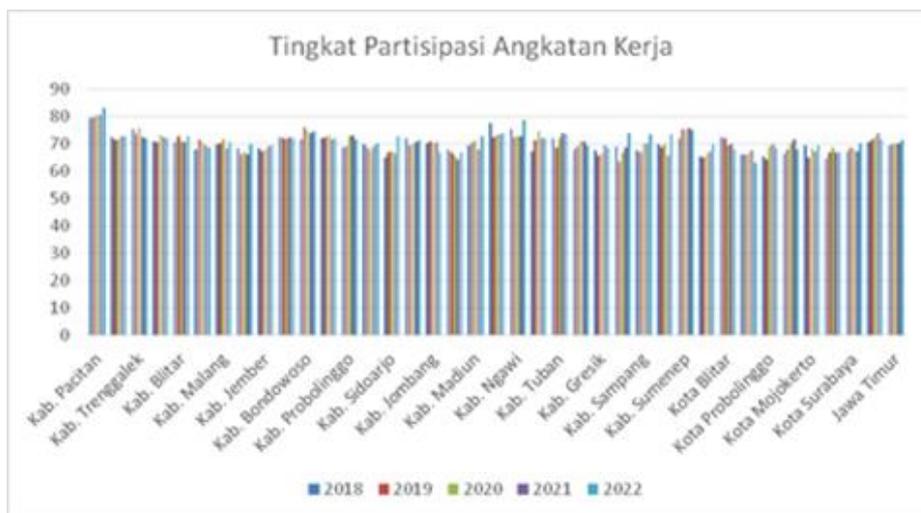
**Grafik 1 TPT Jawa Timur 2018-2022**

Sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian Jihad dan Daryono (2014) mengenai “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Surakarta” yaitu upah minimum mempunyai pengaruh positif dengan tingkat pengangguran, yang artinya setiap kenaikan upah minimum dapat meningkatkan tingkat pengangguran di Surakarta. Namun ada pula pandangan lain dari penelitian M Kemal Bicerli & Merve Kocaman (2019) yang

menyatakan bahwa peningkatan upah minimum dapat menarik daya beli masyarakat, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran. Sedangkan penelitian Rully Sutansyah (2019) tentang “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Indonesia Tahun 2013-2018”, menyatakan bahwa upah minimum memiliki dampak signifikan dalam menekan angka pengangguran di Indonesia. Karena dengan setiap kenaikan upah rendah sebesar 2,934% dapat berkontribusi pada penurunan pengangguran di Indonesia. Dengan banyaknya penduduk yang diduga menganggur, artinya semakin berkurang dari angkatan tenaga kerja yang aktif, akibatnya dapat menyebabkan penurunan tingkat pengaruh partisipasi angkatan kerja (TPAK) (Simanjuntak, 2005).



**Grafik 2 Tingkat Upah Minimum regional Kab/Kota di Jawa timur 2018-2022**



**Grafik 3 TPAK Kab/Kota di Jawa Timur 2018-2022**

Berdasarkan latar belakang dan dengan adanya penelitian terdahulu terkait tema penelitian ini dapat disimpulkan tujuan utama penelitian ini yaitu: (1) Pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur periode 2018-2022; dan (2) Pengaruh

partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur periode 2018-2022; (3) Pengaruh upah minimum dan partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur periode 2018-2022.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Pengangguran**

Dalam perekonomian ekonomi negara berkembang, faktor pengangguran merupakan masalah yang sangat mendasar dan berkesinambungan dengan indikator pembangunan ekonomi termasuk di Indonesia sendiri. Secara luas pengangguran dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi ketidakmampuan angkatan kerja dalam berpartisipasi memperoleh pekerjaan sesuai job disk dan keterampilannya. Dengan kata lain seseorang pengangguran tidak mempunyai pekerjaan. Menurut Edgar O. Edwards (1974) dalam buku *Ekonomi Pembangunan* (Lincoln Arsyad, 2010), pengangguran terbuka dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu pertama pengangguran sukarela yaitu partisipasi angkatan kerja yang dengan sukarela memilih tidak bekerja karena tidak mengharapkan gaji ataupun pekerjaan yang baik, kedua pengangguran terpaksa yaitu partisipasi angkatan kerja yang ingin bekerja tapi masih belum mendapatkan pekerjaan. Menurut International Labor Organization (ILO), pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak berkerja atau sedang mencari pekerjaan, serta tidak mencari pekerjaan karena pesimis tidak akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginannya. Djohanputro (2006) mengemukakan konsep pengangguran terbuka sebagai usia angkatan kerja yang bisa atau mampu bekerja tetapi dengan sukarela tidak mau bekerja. Jadi, dapat dipahami bahwa pengangguran terbuka dikonsepsikan sebagai kondisi usia angkatan kerja namun belum mampu memperoleh pekerjaan.

### **Teori Ekonomi Ketenagakerjaan (Angkatan Kerja)**

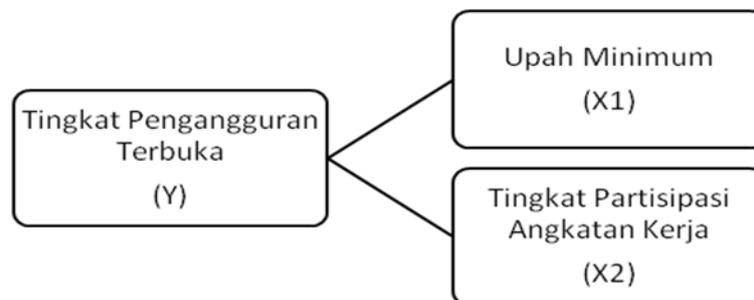
Dalam keberhasilan pembangunan ekonomi salah satu faktor potensial yang dapat meningkatkan produktivitas adalah faktor tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai bagian dari penduduk yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan berkontribusi dalam memproduksi barang dan jasa (Ananta, 1990). Konsep tenaga kerja dapat dikategorikan menjadi angkatan kerja dan non angkatan kerja (Simanjuntak, 1998). Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa, angkatan kerja didefinisikan sebagai usia produktif masyarakat yang dinilai sudah mampu bekerja atau mencari pekerjaan. Adapun dalam teori ekonomi ketenagakerjaan memuat beberapa konsep yaitu:

- 1) Hukum Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja, teori ini mendefinisikan bahwa kebutuhan tingkat upah dan banyaknya tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh interaksi antara penawaran dan permintaan angkatan kerja.
- 2) Teori Manusia Modal (Human Capital Theory), teori ini berfokus pada peningkatan kualitas “modal manusia” dengan memberikan pendidikan, pelatihan, maupun keterampilan dan skill sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan peluang upah yang tinggi.
- 3) Teori Segmentation Labor, mendefinisikan bahwa angkatan kerja terbagi menjadi beberapa segmen yang dapat mempengaruhi pola upah dan kestabilan pekerjaan.

### **Upah Minimum Regional**

Di Indonesia setiap wilayah antar provinsi maupun kabupaten atau kota madya mempunyai faktor geografis dan potensi sumber daya alam yang berbeda, hal inilah yang dapat menyebabkan alasan kenapa upah minimum setiap daerah berbeda. Upah dapat didefinisikan sebagai pemberian upah atau imbalan atas jasa yang dilakukan seseorang atas pekerjaan yang dilakukannya (Suparmono, 2018). Menurut Todaro (2000), tingkat upah umumnya sebagai pembayaran dengan sejumlah uang untuk para pekerja yang mampu dibawah tekanan dan instruksi sesuai dengan kontrak yang dikerjakannya. Sedangkan menurut Sukirno (2008), menyatakan bahwa dalam teori ekonomi pengertian upah dapat didefinisikan sebagai pembayaran jasa-jasa terhadap tenaga kerja yang telah disediakan atas fisik maupun mental. Jadi dapat disimpulkan bahwa, upah minimum regional dapat diartikan sebagai imbalan atau upah kepada seseorang atas kinerjanya berdasarkan pada wilayah regional yang ditempatinya.

### **Paradigma Penelitian**



**Gambar 1. Paradigma Penelitian**

## Hipotesis Penelitian

H1 : Adanya pengaruh signifikan negatif instrumen upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur periode 2018-2022.

H2 : Adanya pengaruh signifikan negatif instrumen tingkat partisipasi angkatan kerja (PTAK) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur periode 2018-2022.

## METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam model penelitian ini yaitu berupa model penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk membuat pengamatan peta konsep atau deskriptif tentang suatu pengamatan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, olah data, analisis data serta kesimpulan hasil data penelitian yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh signifikansi variabel bebas Upah Minimum (X1), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X2) terhadap variabel terikat tingkat pengangguran terbuka (Y) di Jawa Timur Periode 2018-2022.

### A. Data

#### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi pengamatan dan pengumpulan data pada BPS di Provinsi Jawa Timur dengan mengamati Kabupaten serta Kota Madya sebanyak 38 wilayah dalam waktu 5 tahun terakhir mulai periode tahun 2018 sampai 2022.

#### Variabel Penelitian

##### a) Variabel Dependen

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen yaitu tingkat pengangguran terbuka (Y).

##### b) Variabel Independen

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu upah minimum (X1) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X2).

#### Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan model kuantitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari data BPS Nasional maupun BPS Jawa Timur.

### B. Metode Analisis

Pengumpulan data selanjutnya akan diuji menggunakan uji regresi berganda data panel, sebab data yang terkumpul merupakan data gabungan antara interval waktu dan lokasi atau

tempat tetap yang diolah lebih lanjut dengan aplikasi SPSS 26. Output pengelola data yang dilakukan yaitu uji praduga klasik mencakup uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, dengan formula uji regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Tingkat Pengangguran terbuka

a = Konstanta

$\beta_1 X_1$  = Upah Minimum

$\beta_2 X_2$  = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

$\epsilon$  = Error

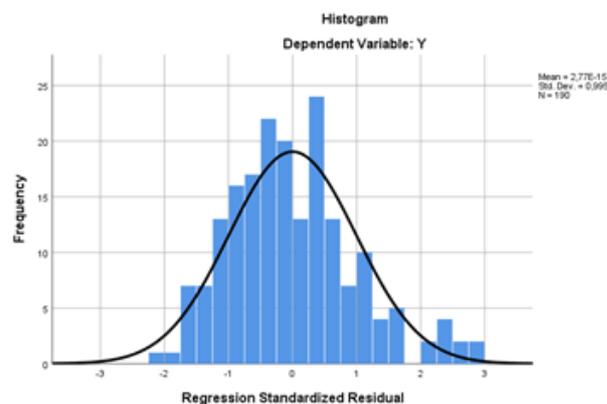
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Dari hasil olah data SPSS 26 dapat diketahui apakah ada hubungan yang tinggi antara instrumen-instrumen data independen dalam uji tersebut. Jika hasil uji yang didapatkan memiliki korelasi yang tinggi, maka variabel bebas memiliki masalah terhadap variabel lainnya yang terkait. Uji Analisis ini meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selain uji asumsi klasik tersebut, dalam penelitian ini uji akan dilakukan uji parsial (uji t) dan uji silmutan (uji F) guna mengetahui sejauh mana keterkaitan atau pengaruh dua variabel bebas (independen) dalam model penelitian ini dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen).

### Uji Normalitas

Pengujian dengan tujuan untuk melihat apakah ada hubungan yang tinggi antara instrument-instrumen independen dalam model uji ini. Jika hasil uji yang didapatkan memiliki hubungan yang tinggi, maka variabel bebas memiliki masalah terhadap variabel lainnya yang terkait.



Dari gambar Grafik Histogram diatas, maka hasil uji yang didapatkan adalah data yang diuji memiliki nilai yang normal. Hal tersebut dikarenakan garis lengkung dari Grafik Histogram membentuk lengkungan ke atas, sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan garis memiliki bentuk yang sama, tidak menceng kanan atau menceng kiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai data yang diuji berdistribusi normal.

Untuk selanjutnya yaitu uji probabilitas, yang dimana data yang nilai nya normal maka ditandai dengan titik-titik hitam (Data Ploting) mengikuti garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji memiliki nilai yang normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk melihat apakah ada hubungan yang terjadi antara variabel-variabel bebas dalam model regresi linier berganda. Jika hasil uji yang didapatkan memiliki korelasi yang tinggi, maka variabel bebas memiliki masalah terhadap variabel lainnya yang terkait. Untuk melihat apakah variabel bebas memiliki masalah atau tidaknya terhadap variabel yang terkait dapat dengan melihat indikator VIF ( Variance Inflation Factor ).

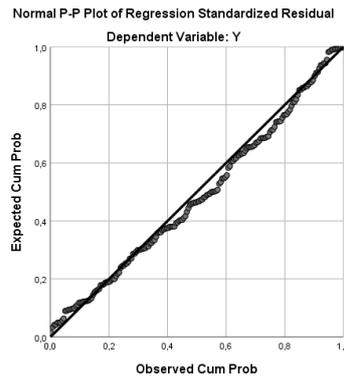
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	10,464	2,426		4,313	,000					
	X1	1,302E-6	,000	,529	8,951	,000	,584	,548	,512	,939	1,065
	X2	-,125	,033	-,223	-3,782	,000	-,354	-,267	-,216	,939	1,065

a. Dependent Variable: Y

Jika nilai tolerance semua variabel lebih dari 0,100 dan nilai VIF kurang dari 10,00 maka nilai semua variabel dapat dinyatakan memenuhi syarat dari Uji Multikolinearitas. Dapat diambil kesimpulan bahwa variabel yang diujikan tidak terjadi Multikolinearitas, untuk menentukan kontribusi antar model variabel bebas yang digunakan.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah Uji yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat suatu ketidaksamaan variansi atau residu dari suatu penelitian terhadap penelitian.



Dari hasil Uji Heteroskedastisitas, titik-titik atau plot memiliki pola acak dan menyebar diatas angka 0 dan sumbu Y yang menandakan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas terhadap model regresi.

Hasil uji regresi linear berganda dalam analisis penelitian ini mencakup 38 sampel data panel selama 5 tahun periode dari tahun 2018 sampai 2022.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	10,464	2,426		4,313	,000					
	X1	1,302E-6	,000	,529	8,951	,000	,584	,548	,512	,939	1,065
	X2	-,125	,033	-,223	-3,782	,000	-,354	-,267	-,216	,939	1,065

a. Dependent Variable: Y

Pengujian dengan SPSS 26, mendapatkan temuan analisis regresi linear berganda dengan formula persamaan regresi:

$$Y = 10,464 + 1,302E-6X1 - 0,125X2 + \varepsilon$$

### Uji Parsial (t)

Berdasarkan analisis uji t dengan nilai signifikan 5% atau 0,05, membuktikan bahwa variabel upah minimum (X1) dengan hasil 8,957 > t hitung (1,65291), artinya upah minimum membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan terhadap tingginya tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel dependen. Sedangkan pada variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (X2) dengan hasil -3,782 < t hitung (1,65291), artinya variabel X2 tidak membuktikan adanya pengaruh signifikan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel dependen.

### Uji Silmutan (F)

Berdasarkan analisis uji F dengan nilai signifikan 5% atau 0,05, membuktikan bahwa variabel upah minimum (X1) dan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (X2) membuktikan hasil 59,228 > F tabel (3,04), yang artinya dua variabel bebas tersebut bersama-sama

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y) sebagai variabel dependen.

Dari hasil Uji Heteroskedastisitas, titik-titik atau plot memiliki pola acak dan menyebar diatas angka 0 dan sumbu Y yang menandakan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas terhadap model regresi.

### Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson
						F Change	df1	df2		
1	,623 <sup>a</sup>	,388	,381	1,46775	,388	59,228	2	187	,000	1,060

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji SPSS 26 membuktikan bahwa nilai R-square yakni 0,338 artinya 38,8% perubahan pada variabel terikat (Y) dapat dijelaskan sebesar 38,8% oleh perubahan-perubahan pada variabel bebas (X1 dan X2), sisanya 61,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model variabel penelitian.

### B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur. Dikutip dari berita resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur TPT, TPT di Provinsi Jawa Timur sendiri mengalami penurunan sebesar 5,49% (BPS PROVINSI JAWA TIMUR, 2022).

### Pengaruh Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur

Dari hasil Uji T yang telah dilakukan oleh penulis, Variabel Upah Minimum Provinsi secara signifikan berpengaruh positif terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Prawira, 2018) yang mana dari hasil penelitian tersebut memberikan pernyataan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Pernyataan tersebut juga sama dengan apa yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh (Frida, 2021) yang menyatakan besar kecilnya Upah Minimum Provinsi, naik turunnya Upah Minimum Provinsi memberikan pengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.

Upah Minimum Provinsi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Besaran nilai UMP Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, terutama 5 Tahun terakhir. Dilihat dari data (BPS, 2022) dari tahun 2018 Upah

Minimum Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 1.868.770 terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 terakhir sebesar Rp. 2.040.442. Dalam penetapan Upah Minimum, pemerintah terus berupaya untuk mempertimbangkan sampai mana pengusaha mampu untuk memberikan upah kepada pekerjanya. Selain itu pemerintah juga mempertimbangkan berbagai persoalan seperti kondisi pengangguran dan penghasilan setiap kota/Kabupaten di Jawa Timur, dan kondisi demografi lainnya. Adapun pada data BPS tahun 2022, menunjukkan data rata-rata upah terhadap lapangan pekerjaan utama, sebagai berikut:

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
	1	2	3	
<b>Kabupaten/Regency</b>				
Pacitan	1 307 818	1 713 379	1 864 441	1 786 677
Ponorogo	1 437 190	1 799 717	2 133 169	2 031 927
Trenggalek	1 707 128	1 819 637	2 145 623	1 980 385
Tulungagung	1 617 367	1 865 603	2 120 606	2 004 240
Blitar	1 227 317	1 850 024	1 956 430	1 870 019
Kediri	1 801 818	2 040 935	2 025 572	1 995 620
Malang	1 436 078	2 227 974	2 188 045	2 146 256
Lumajang	1 231 167	1 766 992	1 977 994	1 822 185
Jember	1 358 895	1 766 353	1 939 392	1 796 044
Banyuwangi	1 480 971	1 890 086	2 104 771	1 961 497
Bondowoso	1 291 546	1 618 433	1 874 531	1 725 556
Situbondo	1 641 895	1 906 438	2 038 682	1 965 415
Probolinggo	1 547 414	2 284 866	1 819 021	1 944 303
Pasuruan	1 827 617	2 855 822	2 130 617	2 514 578
Sidoarjo	2 782 734	3 758 183	3 668 393	3 704 575
Mojokerto	1 469 209	2 944 295	2 517 055	2 682 139
Jombang	1 777 014	2 506 489	2 633 138	2 541 462
Nganjuk	2 199 054	2 195 016	2 046 991	2 109 117
Madiun	1 561 081	2 339 071	2 445 815	2 380 896
Magetan	2 196 775	2 045 125	2 409 692	2 317 763
Ngawi	1 515 963	2 148 569	2 105 870	2 100 837
Bojonegoro	1 506 032	2 395 032	2 233 130	2 243 607
Taban	1 359 919	2 701 871	2 084 790	2 269 937
Lamongan	1 824 746	2 499 243	2 311 992	2 350 472
Gresik	2 470 149	3 831 179	3 126 872	3 503 063
Bangkalan	1 206 093	2 073 019	2 455 253	2 301 526
Sampang	1 283 684	2 425 314	894 224	1 441 196
Pamekasan	932 314	1 501 209	1 453 515	1 453 181
Sumenep	2 066 638	2 190 150	2 054 490	2 088 186
<b>Kota/Municipality</b>				
Kediri	4 544 027	2 952 156	2 846 196	2 891 754
Blitar	2 306 538	2 101 527	2 498 708	2 400 146
Malang	2 174 788	2 905 776	3 119 901	3 059 773
Probolinggo	2 687 813	2 411 087	2 439 054	2 432 380
Pasuruan	1 283 561	2 938 278	2 549 364	2 645 211
Mojokerto	N.A	3 225 817	3 031 275	3 105 796
Madiun	N.A	2 515 986	2 670 497	2 645 732
Surabaya	5 839 676	3 414 688	4 033 518	3 861 713
Batu	2 303 694	2 156 643	2 227 777	2 218 479
Jawa Timur	1 612 734	2 732 690	2 674 591	2 638 752

Sumber: BPS Jawa Timur 2022

Namun menurut penelitian dari (Frida,2020) memberikan penjelasan hasil Uji yang didapat bahwa variabel Upah Minimum dapat berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Apabila Upah Minimum Provinsi melebihi daya beli masyarakat, maka harga produk akan ikut naik juga. Dari hasil pernyataan tersebut sangat berlawanan atau tidak sejalan dengan hasil uji yang dilakukan oleh penulis, karena dari hasil uji yang telah dilakukan variabel Upah Minimum memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh (Soeharjoto,2021) dari hasil uji yang didapat justru tidak terdapat pengaruh sama sekali. Ini bertolak belakang dengan hasil uji penulis, dalam penelitian tersebut (Soeharjoto,2021) penetapan tentang peraturan UMP dari pemerintah merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya dengan adanya kebijakan UMP ini akan menjadi salah satu hambatan bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam hal daya saing.

Dari pernyataan dalam penelitian (Frida,2020) hal tersebut dapat menurunkan daya beli masyarakat yang kemudian berimbas pada produsen produk yang akan menyebabkan produksi barangnya menurun. Dengan menurunnya produksi maka akan mempengaruhi produktivitas yang berakhir pada pengurangan tenaga kerja. Hal tersebut dapat menyebabkan tingkat pengangguran menjadi naik.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu berbagai persoalan tersebut, maka pemerintah menargetkan dengan menetapkan Upah Minimum sesuai dengan apa yang direncanakan dapat mendorong para pengusaha untuk merekrut tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Penulis juga mengutip pernyataan dari teori (Keynes) yaitu "The General Theory of Employment, Interest, and Money" yang dikembangkan oleh seorang ahli ekonomi bernama John Maynard Keynes selama periode Depresi Besar yang terbit pada tahun 1936, dimana karya ini memperkenalkan paradigma klasik terkait pengangguran. Dalam teori tersebut kenaikan dalam kesempatan kerja akan terjadi jika tingkat upah turun. Jadi dapat di garis bawahi apabila pemerintah menetapkan Upah Minimum yang terlalu tinggi, hal tersebut akan menyebabkan para pengusaha mengurangi pekerjanya, yang mana dengan kata lain akan meningkatkan pengangguran karena para pekerja kehilangan pekerjaannya.

### **Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur**

Dari hasil Uji T yang telah dilakukan, didapatkan hasil variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Salsabila,2022) yang mana dalam penelitian dan hasil uji variabel, mendapatkan hasil variabel TPAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan hasil Uji yang dilakukan oleh penulis. Dalam ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam indikator ekonomi digunakan untuk mengukur angkatan kerja. Apabila TPAK mengalami peningkatan maka tenaga kerja akan semakin tinggi juga dalam memproduksi barang dan jasa yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fina,2023) yang mana dalam penelitiannya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Di Provinsi Jawa Timur jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2018-2022 misalnya, menurut data BPS jumlah TPAK di Jawa Timur sebesar 69,65%, di tahun 2022 yang lalu meningkat menjadi 72,07%. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota, 2020–2022 sebagai berikut:

Dapat disimpulkan bahwa hasil uji yang dilakukan oleh penulis sangat berbeda dengan teori Todaro yang menyatakan bahwa salah satu mekanisme yang utama penanggulangan kemiskinan adalah dengan mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Dalam teori TODARO dijelaskan bahwa angkatan kerja yang tinggi akan mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka yang mana akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Penulis berasumsi bahwa TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka namun akan terus meningkat karena walaupun partisipasi angkatan kerja meningkat dan juga banyak namun tidak disertai dengan lapangan pekerjaan yang mumpuni dan seimbang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a) Variable upah minimum (X1) dengan hasil  $8,957 > t$  hitung (1,65291), artinya upah minimum membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan terhadap tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.
- b) Variable tingkat partisipasi angkatan kerja (X2) dengan hasil  $-3,782 < t$  hitung (1,65291), artinya variabel X2 tidak membuktikan adanya pengaruh signifikan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur.
- c) Berdasarkan analisis uji simultan variable upah minimum (X1) dan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (X2) diperoleh nilai signifikan sebesar  $59,228 > F$  tabel (3,04), yang artinya upah minimum dan angkatan kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y) di Provinsi Jawa Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aris, Ananta. 1990. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan (Edisi Kelima)*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Ayu, Frida. B. 2020. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipan Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia*. Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri. Ponorogo.
- Auliyah, Firda. 2023. *Pengaruh Tingkat Penduduk, Pengaruh Tingkat Partisipasi Kerja, Upah Minimum, Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Program Studi Ekonomi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Upah Minimum Jawa Timur*. Surabaya: BPS Jawa Timur.
- BPS Kabupaten Sambas, “Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Sambas 2015”, diakses 19 Maret 2018, <https://www.bps.go.id>.
- Bicerli, M Kemal & Merve Kocaman, (2019). “The Impact of Minimum Wage on Unemployment, Prices, and Growth: A Multivariate Analysis For Tirkey”, *Economic Annals*, Faculty of Economics and Business, University of Belgrade, 221, <https://www.researchgate.net/publication>.
- Djohanputro, Bramantyo. 2006. *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*. Jakarta: PPM.
- Gregory, Mankiw, dkk. 2008. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoyo, Rossanto Dwi. 2018. *Ekonomi Sumber Daya Manusia (Edisi 2)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Payaman, j. Simanjuntak. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: FEUI.
- Prawira. 2018. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia*. EcoGen.
- Punjawat, Jihad Lukis, dkk. 2014, “Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 15,1, <https://media.neliti.com>.
- Salsabila, N. dkk. 2022. *Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengangguran Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya. Samarinda.
- Simanjuntak, Payaman J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Edisi Tujuh Belas. Jakarta: PT. Media Global Eduksi.
- Soehardjoto, dkk. 2003. *Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Indonesia*. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, Vol. 5 No. 2. 2021.

- Sukirno, Sadono. 2008. Mikro Ekonomi. Teori Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparmono. 2018. Pengantar Ekonomi Makro. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sutansyah, Rully Effendy. 2019, “ Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Staff Badan Pusat Statistic, Vol. 14, No. 1.
- Todaro, P. Michael. 2000. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.